

POTRET USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO PASCA PEMBINAAN

by Umi Farida

Submission date: 13-Apr-2020 10:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 1296119708

File name: ARTIKEL_POTRET_UKM_PASCA_PEMBINAAN.pdf (386.05K)

Word count: 3765

Character count: 24859

Draft Artikel

POTRET USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO PASCA PEMBINAAN

Titi Rapini¹⁾, Umi Farida²⁾, Setyo Adji³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 1)

email: titi.rapini@gmail.com

Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Ponorogo 2)

email: Umifarida33@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kondisi Usaha Kecil Menengah setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Indagkop Kabupaten Ponorogo. Dengan mengetahui peningkatannya maka dapat diketahui pula efisiensi dan efektifitas pembinaan yang telah dilakukan. Juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UKM agar dapat dirancang metode /pola pembinaan yang sesuai khususnya pada pengelolaan keuangannya.

Ruang lingkup penelitian ini berada Di Kabupaten Ponorogo, dimana UKM yang diteliti adalah UKM yang telah mengikuti Pembinaan oleh Indagkop selama kurun 2009 sampai 2013.

Data yang diperlukan yaitu data Primer meliputi data hambatan dan kendala yang dialami UKM, data keuangan. Yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan panduan dari kuisioner. Data sekunder meliputi data peserta dan jenis pelatihan - pembinaan yang dilakukan Indagkop Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian, diketahui ada 3 jenis pelatihan mulai 2009 sampai dengan 2013. Namun data ini tidak didukung dengan bidang usahanya, maupun nama perusahaannya. Sampel 50 peserta dengan berbagai tahun dan jenis pelatihan. Hasilnya 52% peserta memiliki usaha, 24% belum, dan 24% tidak ditemukan alamatnya. Sedangkan yang memiliki usaha, mereka tidak memiliki data keuangan secara tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM belum memiliki laporan keuangan baku, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Kinerja Keuangan

OVERVIEW OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AFTER MANAGEMENT TRAINING IN DISTRICT PONOROGO

ABSTRACT

The purpose of this research to know the increase in the financial performance of Small and Medium Enterprises after establishment is done by the Department Indagkop Ponorogo. Knowing that it can also increase the efficiency and effectiveness of the guidance that has been done. Besides that, to know the barriers are faced by SMEs so that can be designed method / pattern of guidance suit the specific on the financial management.

The scope of this research are in Ponorogo, where SMEs surveyed are SMEs that have followed the guidance by Indagkop during the period 2009 to 2013.

The necessary data is data including data Primary barriers and obstacles is experienced by SMEs, financial data. It is obtained by direct interviews with a guide from the questionnaire. Secondary data include data of participants and types of training - coaching is done Indagkop Ponorogo

From the result of the research, it is known there are 3 types of training from 2009 to 2013. However, this data is not supported by its business, and the company name. Sample of 50 participants with a variety of year and type of training. The results are 52 % of participants have a business, 24 % have not, and 24 % did not find the address. While having a business, they do not have the financial data in writing. This indicates that SMEs do not yet have basic financial statements, which can be used to evaluate the performance of financial management

Keywords : Training Model, Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian dan hasil-hasil pembangunan. Sehingga UKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian. Namun perkembangannya hingga kini masih tertinggal jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Sementara tipe usaha kecil ini terbukti benar-benar kuat serta tahan banting pada krisis ekonomi.

Berdasarkan survei BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Mengkop & UKM) usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualannya(turn over) setahun kurang

dari 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total Usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 1 milyar dan Rp 50 milyar) meliputi hanya 0,14% dari jumlah total usaha. Ini berarti potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 % dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Melihat peranan UKM dalam perekonomian ditinjau dari segi jumlah usaha, maupun dari segi penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan lingkungan yang mendukung serta keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan investasi perlu berlangsung berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumber daya nasional dan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha terutama UKM dan koperasi perlu didorong untuk memperluas kesempatan dan pemerataan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi, sehingga

terwujud sistem perekonomian kerakyatan

Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat bergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Di Kabupaten Ponorogo dalam rangka menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan dengan beberapa program antara lain : pertama Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan tentang UKM. Kedua, program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan AMT, dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM. Serta Program monitoring maupun evaluasi, dan sosialisasi lainnya.

Dalam rangka evaluasi perlu diketahui apakah pembinaan yang dilakukan tersebut bermanfaat khususnya bagi UKM. Sehingga dapat disusun perencanaan pembinaan yang lebih sesuai, baik modul maupun model pembinaannya.

Potensi usaha kecil di Kabupaten Ponorogo menurut data Indakop tahun 2003 tercatat 62 unit usaha. Sebagaimana umumnya usaha kecil, kelemahan serta hambatan dalam pengelolaan usahanya baik menyangkut internal maupun eksternal (Titi Rapini, 2004, Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) adalah :

- Tidak melakukan analisis kelayakan usaha, pasar, ataupun perputaran kas.
- Tidak memiliki perencanaan jangka panjang, sistem pembukuan yang memadai, maupun alat-alat kegiatan manajerial lainnya yang umumnya diperlukan oleh suatu bisnis yang profit oriented
- Kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi

dan ambisi pengelola, serta lemah dalam potensi

- Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu, sehingga sering tidak konsisten dengan ketentuan pesanan
- Tingginya Labou Turnover
- Banyak Biaya diluar pengendalian
- Pembagian kerja tidak profesional sehingga terjadi pekerjaan yang melimpah
- Kesulitan modal kerja dan tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja
- Persediaan terlalu banyak pada produk yang kurang laku/salah
- Mis-manajemen dan ketidakpedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial
- Sumber-sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik

Strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan UKM melalui pembinaan dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan antara lain pertama, Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan

dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut beberapa hambatan yang dialami oleh Indagkop antara lain SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menyusun data base jenis pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Indagkop, data base kinerja keuangan UKM Pasca Pembinaan yang diukur dari Nilai Likuiditas, Perputaran Modal Kerjanya, Perbandingan Jumlah Hutang terhadap keseluruhan Modalnya, serta dari Profitabilitas , data hambatan/permasalahan yang ditemuinya. Data ini kan digunakan sebagai bahan penyusunan model pengelolaan keuangan serta membantu mengaplikasikannya melalui pelatihan dan pendampingan.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan model pengelolaan keuangan khususnya bagi UKM, sehingga dapat membuat Laporan Keuangan dengan mudah. Dengan demikian diharapkan perkembangan UKM dapat tumbuh sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat

2. Kajian Pustaka

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia (kumpulan artikel ekonomi-blogspotcom/2009/06) :

1. Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil Penjualan tahunan maksimal

Rp.1.000.000.000 (1 milyar) dan memiliki kekayaan bersih,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak

Rp. 200.000.000,00

2. Definisi menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya,yaitu:

- Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- Industri kecil dengan pekerja 5-15 orang
- Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

UKM merupakan kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan Daerah. Oleh karena UMKM memiliki posisi penting bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat didaerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial (Abdullah Abidin).

Keberadaan UKM yang demikian sebagai bagian dari keseluruhan entitas Nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh UKM tersebut. Sebagaimana hasil Penelitian tentang UKM di daerah Bantul Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM antara lain 1) pemasaran, 2) modal dan pendanaan, 3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, 4) pemakaian bahan baku, 5) peralatan produksi, 6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, 7) rencana pengembangan usaha, 8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal (Jaka Sriyana,2010)

Kendala ataupun hambatan yang dialami UKM juga ditegaskan oleh Lumbanarja (2011) bahwa dalam pembangunan dan

pengembangan UKM banyak strategi dan metode yang telah dilakukan baik langsung maupun tidak langsung....Kendala utama yang dihadapi adalah a) Terbatasnya kemampuan SDM UKM untuk menyerap dan mengaplikasikan kebijakan yang sudah ada, b) Kecenderungan Iklim politik dan ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi upaya pengembangan UKM, c) Relatif rendahnya tingkat kepedulian pembina dan instansi terkait terhadap upaya pengembangan UKM masing-masing unit kerja, d)Kondisi perdagangan bebas (arus globalisasi) menuntut UKM tidak hanya sekedar tetap eksis bertahan akan tetapi dituntut mampu meningkatkan pelayanan dan produktivitas usahanya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, e) Adanya kesenjangan struktural yang cukup lebar antara UKM dengan usaha besar dalam perekonomian nasional, karena ketidak seimbangan laju pertumbuhan keduanya, f) Masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan peraturan daerah dan pusat, g) Masih lemahnya daya saing UKM baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global, h) Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UKM sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dan diversifikasi usaha sangat rendah.

Di kabupaten Ponorogo sendiri hambatan UKM dari hasil penelitian Ratna Trisuma Dewi ditemukan antara lain : SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Berkaitan dengan berbagai kendala yang dihadapi UKM maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Hal ini diperlukan dukungan semua pihak, baik dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi,

dinas/instansi terkait dilingkungan pemerintah kabupaten/kota,dan provinsi. Disamping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UKM (Jaka Sriyana ,2010)

Dalam rangka pengembangan UKM tersebut pemerintah melalui Kementrian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakan pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial. Hal ini dilakukan dengan menyusun program operasional berupa kebijakan-kebijakan diantaranya :a) Program penumbuhan iklim usaha yang kondusif, b) Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif,c) Program pembinaan kewirausahaan yang berkeunggulan kompetitif, d) Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM secara terpadu (Prihatin Lumbanraja,2011).

Sedangkan menurut Wisber Wiryanto (2012) bahwa untuk mendorong tumbuhnya UKM maka pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan sumber daya manusia UKM, peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit, peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Ponorogo. Melalui Indagkop telah melaksanakan pembinaan meliputi : Progam Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan

UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dari hasil penelitian Ahmad Rifa'i, diketahui dari 30 responden UKM yang dibina oleh PT Jasa Bina Marga melalui program Kemitraan periode 2009/2010 pada 2 bulan setelah pelatihan dan pinjaman tidak ada peningkatan yang diinginkan dari 5 variabel yang diamati (sumberdaya manusia, manajemen produksi, administrasi keuangan, pemasaran, motivasi dan rencana usaha). Namun hasil mulai nampak peningkatan pada priode 2 sampai ke 5 supervisi (bulan ke 3sampai ke 7) pengamatan.

3. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada Di Kabupaten Ponorogo, dimana UKM yang diteliti adalah UKM yang telah mengikuti Pembinaan oleh Indagkop selama kurun 2011 sampai 2013. Data yang diperlukan adalah data primer maupun sekunder. Data Primer meliputi data-data hambatan dan kendala yang dialami oleh UKM, data keuangan perusahaan/UKM. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan panduan dari kuisisioner (interview) pada obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder meliputi data jenis pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Indagkop Kabupaten Ponorogo, serta UKM pesertanya. Data ini diperoleh dari Dinas Indagkop. Serta memanfaatkan dokumen –dokumen yang ada pada

obyek yang diteliti yaitu di Indagkop atau UKM yang diteliti.

4. Hasil Penelitian

Dari data diatas tidak terdapat informasi jenis usaha maupun, nama perusahaannya. Kepersertaan mencantumkan nama pesertanya serta alamat tinggal. Daftar peserta pelatihan terdapat pada lampiran 1.Total peserta pelatihan 1020 peserta, terdiri atas 650 merupakan peserta pelatihan Kewirausahaan (63,7%), 195 peserta(19,15%) pelatihan yang berbasis ketrampilan/kerajinan, 150 peserta (14,7%) pelatihan yang diarahkan bagi masyarakat industri tembakau, dan 25 peserta (2,45%) dari koperasi, yaitu Koperasi Wanita.

Dari jumlah peserta tersebut diambil 50 peserta dari berbagai tahun pelatihan. Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi bahwa 26 peserta telah memiliki usaha atau 52%. Sedangkan 24% peserta pelatihan (12 orang) sampai saat penelitian dilakukan belum memiliki usaha. Adapun 24% lainnya alamat yang tertera pada data pelatihan tidak ditemukan, atau telah berpindah alamat (sebanyak 12 peserta).

Namun dari 26 peserta yang telah memiliki usaha, belum memiliki catatan pembukuan secara baik. Sehingga belum diperoleh informasi tentang jumlah asset maupun tingkat aktivitas operasional perusahaan . Sehingga belum dapat diukur tingkat kinerja keuangannya.

Untuk informasi materi pelatihan atau pedoman pelatihan , yang dapat diperoleh yaitu materi pelatihan yang diterbitkan oleh UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.Sedangkan materi pelatihan lainnya tidak diperoleh informasi.

Adapun beberapa materi yang diberikan meliputi: Pengetahuan Dasar Koperasi Jasa Keuangan,Menghimpun Dana,Menyalurkan Dana,Pengelolaan Dana,Akuntansi Simpan Pinjam dan Analisa Keuangan UKM dan Koperasi,Perpajakan,Sistem Pengendalian Intern,Penilaian Kesehatan UKM dan Koperasi.

2.Pembahasan

a. Peserta Pelatihan

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Indagkop kabupaten Ponorogo, dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat pengusaha maupun pengetahuan yang bersifat teoritis dan konseptual.Dengan adanya pembinaan dan pelatihan diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Ponorogo. Sebagaimana disampaikan Malayu

Hasibuan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan (2003).

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan sebagian besar pelatihan adalah tentang Kewirausahaan, yaitu 650 peserta (63,7%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengarahkan pembinaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pelatihan ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan yang bersifat teoritik dan konseptual. Oleh karena itu pelatihan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha, akan tetapi juga kepada masyarakat yang belum memiliki usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa dari sample penelitian diketahui bahwa 24% (12 orang) peserta pelatihan berasal dari masyarakat yang belum memiliki usaha. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan nantinya masyarakat terbuka wawasannya, pengetahuannya sehingga yang bersangkutan dapat tumbuh kemauannya untuk memiliki usaha.

Sedangkan Pelatihan yang bersifat ketrampilan sebanyak 33,85% atau sebanyak (345 peserta). Pelatihan ini pun juga diarahkan kepada masyarakat yang sudah punya usaha maupun belum. Pelatihan yang bersifat ketrampilan ini bagi masyarakat yang telah memiliki usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki usaha, dapat membekali mereka dengan keahlian yang dapat menjadi bekal memulai usaha.

Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian bahwa 14,7% diantaranya diarahkan kepada masyarakat dilingkungan industri tembakau, sebanyak 150 orang yang dilakukan dalam 3 tahap. Pembekalan ketrampilan yang diberikan antara lain :

- Seni kerajinan gerabah
- Seni kreasi Clay
- Seni kerajinan cake Towel

Hal ini dimaksudkan untuk membekali masyarakat petani tembakau ketrampilan diluar bidang usaha yang ditekuninya selama ini. Dengan demikian skill ini dapat menjadi modal usaha alternatif untuk menggantikan industri tembakau yang lesu.

Pelatihan lainnya yang diberikan kepada masyarakat yaitu Pelatihan Bahan

Kerajinan Batik, Bahan Kerajinan Sablon, dan pembuatan Jamu. Dengan adanya pelatihan Batik misalnya, diharapkan masyarakat yang telah memiliki ketrampilan dalam industri Batik, dapat meningkatkan kemampuannya. Sehingga diharapkan dapat mengembalikan kejayaan industri Batik Ponorogo. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki usaha mereka dapat tumbuh kemauannya untuk menekuni bidang usaha yang dilatihkan.

Untuk peserta yang berasal dari koperasi, lebih ditekankan kepada Koperasi Wanita. Dimana koperasi ini merupakan pengembangan dari kegiatan PKK di desa-desa. Oleh karena pengurus Kopwan yang sangat heterogen latar belakang profesi maupun tingkat pendidikannya, maka dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki efektifitas kerja para pengurus. Sehingga pengelolaan koperasi akan berhasil.

Keberadaan Koperasi Wanita yang ada di desa diharapkan dapat ikut membantu menumbuhkan dunia usaha. Karena dengan adanya kopwan diharapkan ibu-ibu rumah tangga dapat berminat untuk memulai usaha dengan adanya lembaga finansial yang lebih dekat dan lebih sederhana didalam proses perolehan dananya.

Namun dari data sample yang diperoleh sebanyak 24% peserta pelatihan hingga penelitian ini dilakukan ternyata belum memiliki usaha. Atau dengan kata lain pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan yang diikutinya, hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Berbagai kendala yang melatarbelakanginya antara lain: belum memiliki modal, belum berminat untuk membuka usaha, dan yang terakhir adalah karena keikutsertaannya sekedar partisipasi program pemerintah. Karena peserta pelatihan biasanya delegasi atau ditunjuk oleh desa ataupun pejabat di wilayah tempat tinggalnya.

Bagi peserta yang berasal dari pengusaha atau pada saat ini telah memiliki usaha sebanyak 26 orang (52%), sayangnya sampai saat ini belum memiliki data informasi keuangan (catatan pembukuan). Sehingga belum dapat dilakukan penilaian hasil kinerja keuangannya.

Dengan tidak adanya catatan keuangan, maka kita sulit untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha.

Selain hal itu, dengan tidak adanya catatan pembukuan maka usaha inipun belum memiliki laporan keuangan yang memadai. Padahal untuk dapat mengakses lembaga-lembaga keuangan, laporan tersebut sangat diperlukan. Sedangkan untuk kepentingan internal perusahaan, informasi keuangan diperlukan untuk memahami kondisi keuangan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting (Suad Husnan, 2000).

Berbagai kendala yang menjadi alasan belum dimilikinya catatan keuangan, antara lain:

- Pencatatan dianggap pekerjaan yang ribet, dan menyita waktu
- Prinsip bahwa yang penting modal kembali dan dapat diputar lagi sudah dianggap cukup
- Belum ada keinginan untuk meningkatkan/mengembangkan usahanya.
- Tidak memiliki pengetahuan/ketrampilan yang memadai untuk menyusun pembukuan

Dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa ada 12 sample yang tidak ditemukan pada alamat yang tertulis di daftar peserta. Ada berbagai hal yang kemungkinan menjadi penyebab, antara lain alamat yang kurang jelas sehingga kami kesulitan menemukannya. Selain itu, nama yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di alamat yang tertera pada data pelatihan. Karena pelatihan yang kami ambil mulai 2009 hingga 2013.

2.2. Materi Pelatihan

Mengacu pada teori pengembangan sumber daya manusia (Malayu Hasibuan: 2003), ada dua metode yaitu: dengan cara Informal dan Formal. Pengembangan informal, yaitu pengembangan yang dilakukan atas keinginan dan usaha sendiri dengan melatih dan mengembangkan dirinya, atau dengan membaca buku. Sedangkan cara Formal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh Indagkop dapat dikategorikan sebagai pengembangan formal bagi sumber daya para pengusaha dan calon pengusaha di kabupaten Ponorogo.

Pelatihan yang diarahkan pada pengelolaan keuangan belum dilakukan secara lebih spesifik. Pelatihan yang terkait pengelolaan keuangan sifatnya sangat luas, dan dibahas secara singkat. Materi ini diberikan sebagai bagian pelatihan kewirausahaan. Sehingga belum mengarah pada bagaimana teknis untuk menyusun sebuah catatan informasi keuangan suatu usaha.

Begitu pula dari hasil penelitian terkait informasi bahwa sebagian peserta yang sudah memiliki usaha belum memiliki catatan keuangan, atau pembukuan dikarenakan menyita waktu, serta mereka memang belum memiliki kemampuan dibidang tersebut. Padahal untuk dapat mengakses lembaga-lembaga keuangan, laporan tersebut sangat diperlukan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan modalnya, para pelaku usaha ini banyak memanfaatkan Lembaga Keuangan Informal (Asis, Titi, 2013). Untuk itu diperlukan suatu panduan sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan keuangan yang mudah.

3. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Ada 3 jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Indagkop yaitu pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan yang berbasis ketrampilan, dan pelatihan yang ditujukan untuk Koperasi
2. Peserta pelatihan meliputi UKM/masyarakat yang memiliki usaha, masyarakat yang tidak/belum memiliki usaha, dan Koperasi Wanita
3. Dari peserta yang telah memiliki usaha belum memiliki catatan pembukuan yang memadai/laporan keuangan, sehingga belum dapat diukur kinerja keuangannya
4. Kendala yang dihadapi UKM dalam melakukan pencatatan adalah waktu, dan pengetahuan/ketrampilan dalam melakukan pencatatan

2. Saran-saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memetakan UKM yang ada di Kabupaten Ponorogo yang sudah mengikuti pelatihan

- dan yang belum , yang bukan berbasis data peserta pelatihan
2. Perlu dilakukan pelatihan yang lebih bersifat teknis yang dilakukan diluar waktu produksi (jam kerja)
 3. Dilakukan pemetaan jenis pelatihan yang sudah diikuti oleh UKM
 4. Perlu disusun jenis Pelatihan yang diperlukan, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
 5. Perlu peran serta pihak-pihak diluar pemerintah untuk melakukan pembinaan UKM, karena jumlah UKM yang sangat banyak sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abidin, Penelitian “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah.”
- Ahmad Rifa’i, 2013, Penelitian “Peran Pembinaan Manajemen Usaha Terhadap Kemajuan Bisnis UKM (Studi kasus Mitra Binaan PT Jasa Marga Persero)”
- Asis Riat Winanto dan Titi Rapini, 2013, Penelitian “ Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Sektor Informal”
- Jaka Sriyana, 2010, Penelitian “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul”, disampaikan dalam Simposium Nasional Menuju Purworejo Dinamis Dan Kreatif.
- Kumpulan artikel Ekonomi”UKM Dan Pembangunan
Bekelanjutan”kumpulan- Artikel –
ekonomi-blogspot.com/2009/06/ukm-
dan ekonomi-berkelanjutan.html
- Malayu S P Hasibuan, 2003, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Prihatin Lumbanraja, 2011, “ Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat Dan Lingkungan Hidup”, jurnal Ekonomi, Volume 14, No:2, April 2011
- Ratna Trisuma Dewi, 2009, Skripsi “Strategi Dalam Menumbuhkan Dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan Oleh dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, Dan Penanaman Modal di Kabupaten Ponorogo.
- Suad Husnan, 2000, “Manajemen Keuangan”, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Titi Rapini, 2004, seminar Tri Wulan”Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pembinaan Usaha Kecil, Fakultas Ekonomi Univ Muhammadiyah Ponorogo
- UPTD Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, 2006 “Materi Diklat Berbasis Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia “, Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, Malang
- Wisber Wiryanto, 2012, judul makalah “ Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015”, disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada Juli 2012.

POTRET USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO PASCA PEMBINAAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unej.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.usu.ac.id

Internet Source

5%

3

arhamulwildan.blogspot.co.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On